

STRATEGI PENGAMALAN TIGA PILAR BUDAYA CIANJUR “NGAOS, MAMAOS, MAENPO” DI KABUPATEN CIANJUR

Strategy for Implementing the Three Pillars of Cianjur Culture “Ngaos, Mamaos, Maenpo” in Cianjur District

¹Irdan Muhammad Ramdhan, ²Edah Jubaedah, ³Septiana Dwi Putrianti

^{1,2,3}Politeknik STIA LAN Bandung

¹irdan.ramdhan@gmail.com, ²edah.jubaedah@poltek.stialanbandung.ac.id,

³septiana.dwiputrianti@poltek.stialanbandung.ac.id

**INFORMASI
ARTIKEL**

ABSTRAK

Article history :

Dikirim :

02-10-2025

Revisi Pertama :

07-06-2026

Diterima :

27-06-2026

Kata Kunci :

strategi; budaya; cianjur

Keywords :

strategy; culture; cianjur

Budaya merupakan refleksi perilaku nyata masyarakat yang terwujud dalam hasil cipta, rasa, dan karsa yang dapat dikenali oleh pancaindra maupun rasionalitas. Penelitian ini mengangkat permasalahan utama mengenai tantangan pelestarian Tiga Pilar Budaya Cianjur, yaitu Ngaos, Mamaos, dan Maenpo, di tengah arus modernisasi dan kemajuan teknologi yang berpotensi mengikis nilai-nilai kearifan lokal. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi faktor-faktor penghambat serta merumuskan strategi penguatan pengamalan Tiga Pilar Budaya di Kabupaten Cianjur. Metode yang digunakan adalah etnografi dengan pendekatan kualitatif berparadigma postpositivisme, melalui teknik observasi partisipatif, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan lemahnya regenerasi, rendahnya minat generasi muda, keterbatasan SDM pengajar Maenpo, serta kurangnya pemahaman nilai filosofis, seni, dan kesehatan yang terkandung dalam tradisi tersebut. Dari sisi kebijakan, meski terdapat payung hukum berupa Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020, implementasi belum didukung instrumen operasional yang rinci dan sistematis. Rekomendasi penelitian menekankan perlunya pemerintah daerah dan DPRD menyusun kembali strategi pemajuan berbasis anggaran dengan mekanisme check and balance, meningkatkan kualitas SDM kebudayaan, memasukkan muatan lokal ke dalam kurikulum sekolah dan pesantren, mengembangkan budaya sebagai basis ekonomi inklusif, hingga merumuskan Rencana Aksi Daerah sebagai turunan Perda. Simpulan penelitian menegaskan bahwa penguatan Tiga Pilar Budaya Cianjur memerlukan kebijakan taktis, kolaboratif, dan terintegrasi dalam pembangunan daerah.

Abstract

Culture is a reflection of societal behavior, embodied in creative, rational, and sensory expressions. This study addresses the challenge of preserving Cianjur's Three Cultural Pillars – Ngaos, Mamaos, and Maenpo – amid modernization and technological progress that risk eroding local wisdom. The research aims to identify inhibiting factors and formulate strategies to strengthen the practice of these pillars in Cianjur Regency. The method applied is ethnography with a qualitative approach under a post-positivist paradigm, employing participatory observation, interviews, documentation, and literature review. Findings reveal weak regeneration, low youth interest, limited human resources for teaching Maenpo, and insufficient understanding of its philosophical, artistic, and health values. From a policy perspective, although supported by Regent Regulation No. 10/2020, implementation lacks systematic operational instruments. Recommendations highlight the need for local government and parliament to redesign cultural advancement strategies through budget-based mechanisms with checks and balances, enhance cultural human resources, integrate local curricula into schools and religious institutions, develop culture as a driver of inclusive economy, and establish a Regional Action Plan derived from existing regulations. The study concludes that strengthening Cianjur's Three Cultural Pillars requires tactical, collaborative, and integrated policies within regional development.

A. PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Hubungan antara kebudayaan dan masyarakat adalah refleksi dari perilaku nyata yang teraktualisasi menjadi ciri khas suatu entitas. Negara diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 32 ayat (1) untuk memajukan Kebudayaan Nasional, menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaannya. Pelestarian ini harus berfungsi memperkukuh jati diri dan memperkuat ikatan rasa persatuan. Dalam konteks Kabupaten Cianjur, nilai-nilai leluhur ini dikristalisasi dalam konsep Tiga Pilar Budaya: Ngaos, Mamaos, dan Maenpo, yang secara formal ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2020.

Ngaos (tradisi membaca dan mempelajari kitab suci) memperkuat nuansa keagamaan Cianjur sebagai kota santri; Mamaos (seni tembang Sunda) mencerminkan kehalusan budi dan rasa persaudaraan; sementara Maenpo (seni bela diri pencak silat khas Cianjuran) melambangkan keterampilan fisik dan ketangguhan mental. Tiga pilar ini seharusnya menjadi satu kesatuan yang utuh, bersinergi, dan saling menguatkan, mewujudkan sinergitas gerakan karakter dan gagasan yang terimplementasi dalam kehidupan nyata masyarakat. Meskipun memiliki landasan hukum yang kuat, implementasi Perda Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2020 menunjukkan kendala substansial.

Permasalahan utama yang teridentifikasi meliputi belum optimalnya komitmen para pimpinan birokrasi, kurangnya literasi dan reaktualisasi nilai-nilai pilar secara konsisten, serta ketiadaan buku pedoman induk atau petunjuk teknis sebagai rujukan operasional di lapangan. Kondisi ini menyebabkan pengamalan Tiga Pilar Budaya masih dalam kondisi lemah, sebatas simbolik pada beberapa tokoh agama dan budaya, dan belum diimplementasikan secara efektif untuk mencapai tujuan perlindungan, pengembangan, dan pemberdayaan.

Secara administratif, keberhasilan aktualisasi Tiga Pilar Budaya ini sangat relevan dan dapat dilihat korelasinya dengan indikator kinerja pemerintah daerah, seperti Indeks Kepemimpinan Daerah (Permendagri Nomor 30 Tahun 2020), Indeks Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP, Perpres Nomor 29 Tahun 2014), dan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM). Reposisi budaya dari sekadar urusan sosial dan seni menjadi indikator kinerja birokrasi merupakan agenda penting dalam Administrasi Publik karena keberhasilan implementasi kebijakan budaya akan menentukan keberhasilan pembangunan karakter masyarakat dan tata kelola pemerintahan daerah.

Dalam perspektif Administrasi Publik, implementasi kebijakan budaya tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan, koordinasi antarpemangku kepentingan, kepemimpinan birokrasi, partisipasi masyarakat, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam tata kelola pemerintahan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kegagalan implementasi kebijakan berbasis budaya umumnya disebabkan oleh lemahnya koordinasi kelembagaan, rendahnya dukungan sumber daya, tidak tersedianya pedoman operasional, dan belum terbangunnya mekanisme kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan suatu kebijakan budaya tidak cukup diukur dari keberadaan regulasi, tetapi juga dari efektivitas implementasi dan kapasitas tata kelola yang mendukungnya.

Penelitian Suranto dan Darumurti (2024) menunjukkan bahwa inovasi kebijakan publik berbasis kearifan lokal akan berhasil apabila didukung oleh kapasitas organisasi pemerintah, partisipasi masyarakat, serta kelembagaan yang adaptif terhadap karakteristik budaya lokal. Demikian pula, penelitian mengenai implementasi kebijakan pariwisata berbasis kearifan lokal menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor, dukungan pemerintah daerah, serta penguatan aktor lokal dalam proses implementasi. Sebaliknya, berbagai studi mengenai implementasi kebijakan pelestarian budaya menemukan bahwa lemahnya tata kelola, minimnya sumber daya, dan rendahnya komitmen birokrasi sering kali menyebabkan kebijakan budaya berhenti pada tataran simbolik tanpa menghasilkan perubahan nyata di masyarakat.

Penelitian lainnya mengenai budaya Cianjur telah memberikan landasan empiris. Siti Maryam (2012) dalam penelitiannya yang berjudul "Menjawab Tantangan Global dengan Mengembangkan Potensi Lokal: Studi Kasus pada Budaya dan Literasi Masyarakat Cianjur", berfokus pada keunggulan budaya lokal dan literasi, terutama pada Mamaos, namun masih sebatas aspek pengungkapan budaya melalui bacaan. Muhammad Ighbal (2017) melalui penelitiannya yang berjudul "Internalisasi Nilai-Nilai Budaya Dalam Seni Mamaos di Tengah Era Globalisasi" juga berfokus pada internalisasi nilai Mamaos di tengah globalisasi.

Sementara itu, penelitian Idan Kurnia (2017) yang berjudul "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Tiga Pilar Budaya Cianjur (Kajian Di Desa Majalaya Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur)" mengkaji partisipasi masyarakat dalam pelestarian Ngaos, Mamaos, dan Maenpo di tingkat desa, dan Aryanti, Sundawa, dan Dahliyana (2022) yang berjudul "Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Tiga Pilar Budaya (Ngaos, Mamaos, Maenpo) Dalam Pembelajaran IPS di SMP" menganalisis penguatan karakter melalui Tiga Pilar dalam pembelajaran IPS di sekolah formal.

Kajian-kajian sebelumnya menunjukkan internalisasi nilai-nilai yang positif namun gagal menganalisis kegagalan implementasi kebijakan Perda 10/2020 secara sistematis dari perspektif Administrasi Publik Terapan. Kesenjangan ini terletak pada kurangnya diagnosis kritis terhadap mekanisme pengambilan keputusan, dukungan kelembagaan, dan alokasi sumber daya yang gagal menjembatani nilai abstrak menuju tindakan nyata yang terukur.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan kerangka holistik Enam Dimensi Kearifan Lokal Mitchell (2003), meliputi pengetahuan, nilai, keterampilan, sumber daya, mekanisme pengambilan keputusan, dan solidaritas kelompok sebagai instrumen diagnostik untuk secara kritis menganalisis kesenjangan operasional antara regulasi dan praktik lapangan. Melalui kerangka ini, penelitian ini akan mengidentifikasi secara rinci titik kegagalan administratif (terutama pada dimensi

mekanisme pengambilan keputusan dan sumber daya lokal) yang menyebabkan pengamalan Tiga Pilar Budaya Cianjur terperangkap pada tataran simbolik. Selain itu, penelitian ini menyajikan model strategi pengembangan yang integratif, menggabungkan tahapan strategis (Sagala, 2013), model kurikulum administratif (Dakir, 2010), dan konversi nilai budaya ke ekonomi pariwisata (Yoeti, 1996), yang belum pernah ditawarkan dalam konteks kebijakan budaya Cianjur.

B. METODE/METHOD

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan paradigma post-positivisme. Pendekatan kualitatif dipilih karena subjek yang dikaji yakni strategi pengamalan budaya lokal memerlukan pemahaman mendalam terhadap nilai, makna, dan dinamika sosial budaya yang terjadi secara alamiah di lapangan. Model yang digunakan adalah Etnografi. Metode ini relevan untuk mencapai tujuan penelitian yang berfokus pada penggalian makna, pola perilaku, sistem nilai, dan simbol budaya yang hidup di Kabupaten Cianjur. Etnografi memungkinkan peneliti untuk memandang realitas sosial budaya sebagai sesuatu yang holistik, dinamis, dan penuh makna, sesuai dengan prinsip-prinsip metodologis naturalisme (perilaku dipahami dalam konteks alami), pemahaman (interpretasi makna di balik tindakan sosial), dan penemuan (proses induktif berbasis temuan lapangan).

Penentuan informan dilakukan berdasarkan purposive sampling, yaitu pemilihan narasumber yang memiliki kompetensi, kedudukan, dan kewenangan yang relevan dengan topik penelitian. Informan kunci mencakup unsur eksekutif (Sekda, Asisten Administrasi Umum, Kabag Umum dan Keuangan), legislatif (Komisi III DPRD), otoritas agama (MUI), dan tokoh-tokoh sepuh di bidang Ngaos, Mamaos, dan Maenpo. Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi untuk memastikan kedalaman dan validitas informasi melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan kajian dokumen.

Model analisis data yang digunakan adalah model Etnografi Spradley (1980), yang terdiri dari empat tahapan sistematis: (1) analisis domain, tahap awal untuk memperoleh gambaran umum dan menyeluruh (domain) tentang situasi sosial yang diteliti; (2) analisis taksonomi, melakukan analisis terhadap keseluruhan data yang telah dikelompokkan berdasarkan domain; (3) analisis komponensial, analisis yang dilakukan untuk mencari perbedaan atau kontras antar elemen dalam domain; dan (4) analisis tema kultural, tahap akhir untuk mencari "benang merah" dari seluruh analisis domain, taksonomi, dan komponensial, yang kemudian digunakan untuk menyusun "konstruksi bangunan" situasi sosial/objek penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN/RESEARCH FINDING AND DISCUSSION

1. Penerapan Tiga Pilar Budaya Cianjur (Ngaos, Mamaos, Maenpo) di Kabupaten Cianjur

Analisis terhadap pengamalan Tiga Pilar Budaya Cianjur menggunakan enam dimensi Kearifan Lokal Mitchell (2003) menunjukkan bahwa implementasi Perda Kabupaten Cianjur 10/2020 masih belum efektif dan belum mencapai tahap internalisasi nilai yang kuat.

1.1. Dimensi Pengetahuan Lokal

Pengetahuan lokal mengenai Tiga Pilar masih diakui, namun penyebarannya tidak merata dan mengalami transformasi struktural. Tradisi Ngaos yang dulu merupakan aktivitas organik (Maghrib Mengaji di surau/rumah guru ngaji), kini bergeser menjadi aktivitas institusional (TKA/TPA, pesantren modern) untuk bertahan dari gempuran teknologi. Adaptasi ini, meskipun positif, menunjukkan bahwa transfer pengetahuan secara organik dalam lingkungan keluarga telah melemah. Sementara itu, pengetahuan dan keterampilan Maenpo menghadapi tantangan besar. Meskipun ada 23 padepokan pencak silat, hanya 3 padepokan yang benar-benar fokus melestarikan dan menjaga

filosofi Maenpo secara turun temurun. Sentralisasi pelestarian di Alun-Alun Cianjur menunjukkan upaya pemerintah untuk memelihara eksistensi, tetapi kegagalan diseminasi ke 24 kecamatan lainnya mengindikasikan kegagalan regenerasi pengetahuan di tingkat akar rumput.

1.2. Dimensi Nilai Lokal

Nilai-nilai luhur Tiga Pilar Budaya Cianjur Ngaos, Mamaos, dan Maenpo (keimanan, kebersamaan, kesopanan) masih diakui secara normatif dan dilegitimasi oleh Perda. Namun, hasil penelitian dan wawancara dengan tokoh agama menunjukkan bahwa pemahaman normatif ini menurun drastis di kalangan generasi muda karena terpapar budaya populer yang instan. Nilai-nilai ini, seperti penghormatan terhadap tradisi dan hidup sederhana yang diajarkan dalam Mamaos, gagal menjadi *accepted and expected behavior*. Peraturan daerah, tanpa diikuti oleh praktik berulang dan pembiasaan yang kuat, hanya berfungsi sebagai simbol tanpa kekuatan sebagai pengendali sosial.

1.3. Dimensi Keterampilan Lokal

Keterampilan yang terkandung dalam pilar menghadapi erosi. Keterampilan praktis Ngaos (ketertarikan membaca Al-Qur'an) menurun di luar lingkungan pesantren. Mamaos diwariskan melalui program seperti "seniman masuk sekolah," namun dibatasi oleh minimnya SDM pelatih (maestro) yang benar-benar mendalami filosofi seni tersebut. Sementara itu, keterampilan bela diri Maenpo (fisik, seni, spiritual) yang seharusnya menjadi *survival skill* bagi masyarakat Cianjur, kalah bersaing dengan olahraga global seperti taekwondo dan karate. Keterbatasan pelatih profesional dan jalur prestasi yang tidak jelas menghambat konversi nilai budaya menjadi keterampilan substantif yang relevan di era modern.

1.4. Dimensi Sumber Daya Lokal

Terdapat disparitas alokasi sumber daya yang ekstrem di antara Tiga Pilar. Infrastruktur Ngaos sangat memadai, dengan 5.053 masjid dan 490 pesantren yang menampung 55.267 santri. Namun, infrastruktur untuk pilar seni dan beladiri sangat minim. Sanggar seni yang mengajarkan Mamaos dan karawitan hanya berjumlah 86 di seluruh Kabupaten Cianjur (32 kecamatan dan 354 desa), menunjukkan jangkauan yang sangat rendah. Selain itu, tidak ada pusat pelatihan sentral yang memadai atau "Rumah Budaya" khusus untuk Ngaos, Mamaos, dan Maenpo sebagai sentral informasi dan pengembangan. Disparitas ini mengonfirmasi kegagalan administratif dalam mengalokasikan prioritas sumber daya secara seimbang, meskipun ketiga pilar memiliki kedudukan hukum yang setara.

1.5. Dimensi Mekanisme Pengambilan Keputusan Lokal

Meskipun Perda Kabupaten Cianjur 10/2020 telah ditetapkan, mekanisme perlindungan dan pengembangan di tingkat kabupaten dan OPD tidak berjalan. Ketiadaan perencanaan yang rasional, pengorganisasian program yang sistematis, dan sistem evaluasi kinerja yang jelas membuat Perda hanya menjadi dokumen legalistik. Tidak ada petunjuk teknis, kurikulum muatan lokal yang disepakati para ahli, atau penetapan kelembagaan yang bertanggung jawab (Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Olahraga, atau lembaga keagamaan). Kegagalan birokrasi ini mencegah transisi dari sekadar aturan (petunjuk umum) menjadi regulasi (seperangkat aturan mengikat dengan tindakan dan akibat hukum).

1.6. Dimensi Solidaritas Kelompok Lokal

Solidaritas kelompok masih terlihat dalam kegiatan gotong royong dan komunitas seniman. Namun, inisiatif dan kreativitas dari para pemangku kepentingan (tokoh budaya dan cendekiawan) kurang terserap oleh pemerintah daerah. Pengamalan Tiga Pilar Budaya Cianjur pada saat ini tidak didorong oleh visi pembangunan yang memajukan aspek budaya, tetapi digerakkan secara paksa oleh aturan. Hal ini menyebabkan kebudayaan daerah berjalan "nyaris di tempat," tanpa mampu tampil sebagai

ikon yang original dan menarik daya kunjungan wisata budaya. Kegagalan pemerintah bertindak sebagai fasilitator yang efektif mematkan daya inovasi kolektif.

2. Faktor Penghambat Pengamalan Tiga Pilar Budaya Cianjur “Ngaos, Mamaos, Maenpo” di Kabupaten Cianjur

Tidak efektif dan lemahnya pengamalan tiga pilar budaya Cianjur Ngaos, Mamaos, dan Maenpo di Kabupaten Cianjur sesungguhnya dilatarbelakangi oleh beberapa faktor penghambat secara kelembagaan, anggaran, serta perubahan sosial dan globalisasi. Pertama, faktor kelembagaan menunjukkan bahwa Tiga Pilar Budaya Cianjur “Ngaos, Mamaos, Maenpo” tidak menjadi ruh organisasi pemerintah daerah. Keterikatan pemerintah terhadap tiga pilar budaya tersebut hanya dirasakan oleh dinas terkait yang merasa memiliki tanggung jawab seperti Disdik dan Disparbud, sementara instansi lain hanya bertindak sebagai “penonton”. Hambatan ini diperparah oleh kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di bidang kebudayaan yang mampu memotivasi dan memiliki pengetahuan mendalam tentang Tiga Pilar Budaya Cianjur sangat minim. Belum ada standar kualitas kompetensi yang ditetapkan untuk pelatih atau pengembang budaya.

Kedua, faktor anggaran, di mana dukungan anggaran terhadap upaya penguatan budaya di Kabupaten Cianjur sangat terbatas dan tidak terperinci. Pagu anggaran Disbudpar (Rp 358.000.000) dan Disdikpora (Rp 3.400.000.000) yang ada menunjukkan alokasi yang kecil untuk pengembangan budaya spesifik. Anggaran Tiga Pilar Budaya Cianjur kurang jelas pagu anggarannya dan sering kali tidak dimasukkan dalam komponen Belanja Daerah secara eksplisit. Hal ini menunjukkan kegagalan pemerintah dalam budget tagging dan menghambat fungsi check and balances DPRD. Pemerintah daerah juga gagal membuat kalkulasi metodik untuk mengakses Dana Abadi Kebudayaan dari APBN yang telah mencapai Rp 20 triliun

Ketiga, faktor perubahan sosial dan globalisasi. Disrupsi teknologi dan globalisasi telah menyebabkan lahirnya mix-behaviour pada generasi muda, yang secara radikal mengubah struktur perilaku dan moral. Budaya Ngaos misalnya, kini lebih banyak terbatas pada komunitas pesantren dan tidak lagi menjadi ciri khas seluruh warga Cianjur, sementara minat generasi muda terhadap Mamaos dan Maenpo kian menurun akibat dominasi budaya populer, urbanisasi, serta perubahan gaya hidup. Urbanisasi besar-besaran juga memutus keterhubungan dengan akar budaya lokal, diperparah oleh dikotomi gender dalam praktik budaya (Mamaos lebih banyak diikuti perempuan, Maenpo oleh laki-laki), serta adanya potensi konflik antar-etnis dan agama yang menghambat harmonisasi nilai budaya. Di sisi lain, keterbatasan pendidikan budaya di sekolah—dengan muatan lokal yang belum terstruktur—dan pergeseran ekonomi dari sektor pertanian ke industri turut mengurangi ruang interaksi generasi muda dengan budaya lokal. Hambatan ini semakin kompleks karena dukungan pemerintah daerah, meski telah ada Perda No. 10 Tahun 2020, masih minim dalam aspek kebijakan teknis, pedoman pelaksanaan, pendanaan, dan promosi yang berkelanjutan.

Perbandingan data juga menunjukkan bahwa meskipun Cianjur mengklaim sebagai “Kota Santri,” rasio jumlah pesantren (490) terhadap jumlah penduduk (2,5 juta) tidak merepresentasikan klaim tersebut secara statistik, bahkan lebih rendah dibanding beberapa kabupaten lain di Jawa Barat. Hal ini menegaskan bahwa nilai Ngaos harus direvitalisasi dan diperkuat secara kultural dan statistik untuk memvalidasi identitas daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengembangan yang efektif disusun secara operasional dan sistematis untuk menginternalisasi Tiga Pilar Budaya Cianjur.

3. Strategi Pengembangan Pengamalan Tiga Pilar Budaya Cianjur “Ngaos, Mamaos, Maenpo” di Kabupaten Cianjur

Mengacu pada tahapan strategi Sagala (2013), penulis menyusun strategi untuk mengatasi kegagalan administratif dan kelembagaan dalam pengamalan Tiga Pilar Budaya Cianjur, sebagai berikut:

3.1. Strategi Perumusan Misi dan Penguatan Anggaran

Strategi ini berfokus pada reposisi Tiga Pilar Budaya Cianjur sebagai soko guru pembangunan daerah (pendidikan, ekonomi, wisata) dan bukan sekadar kewajiban regulasi. Perlu adanya integrasi eksplisit Tiga Pilar dalam Visi dan Misi (RPJMD), yang memberikan motivasi intrinsik bagi OPD. Dari sisi pendanaan, strategi ini memerlukan Budget Tagging APBD yang jelas dan terperinci untuk pengembangan Tiga Pilar Budaya Cianjur. Pemerintah daerah, khususnya Kabag Umum dan Keuangan, harus membuat kalkulasi metodik untuk memanfaatkan sumber dana APBN, seperti Dana Abadi Kebudayaan dan Dana BOSP, yang totalnya mencapai puluhan triliun rupiah, untuk mendukung program pengembangan budaya lokal

3.2. Strategi Asesmen Lingkungan Eksternal melalui Penguatan Identitas Kearifan Lokal

Untuk melawan arus mix-behaviour dan erosi nilai, strategi ini menggunakan pendidikan sebagai benteng (counter culture). Dinas Pendidikan (Disdikpora) harus mengoptimalkan ruang yang diberikan oleh Kurikulum Merdeka untuk mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal berbasis kearifan lokal (meliputi Ngaos, Mamaos, Maenpo, serta nilai Someah dan Tatanen). Implementasi Mulok dapat dilakukan melalui tiga opsi: (1) menjadi mata pelajaran tersendiri; (2) diintegrasikan ke seluruh mata pelajaran; atau (3) melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Tiga Pilar. Strategi ini juga harus diperkuat dengan Program Unjuk Kompetensi dan festival budaya secara rutin (PHBI/PHBN) yang didukung oleh anggaran stimulan bagi lembaga dan individu berprestasi

3.3. Strategi Asesmen Organisasi (Pesantren) dengan Kurikulum Muatan Lokal

Mengingat keunggulan infrastruktur Ngaos (490 pesantren, 55.267 santri) dan kelemahan SDM Maenpo, strategi ini menggunakan Administrative Leverage untuk menjadikan pesantren sebagai pusat keunggulan. Kurikulum Mulok di pesantren harus menggabungkan Ngaos dan Maenpo (dengan filosofi basthotan fil ilmi wal jismi – kuat ilmu dan raga) untuk mengatasi kekurangan pelatih dan mempercepat regenerasi. Pelibatan aktif santri di lembaga formal dan pemerintahan (membawa shibghah santri ke ruang publik) adalah kunci untuk memajukan identitas Kota Santri secara kultural.

3.4. Strategi Perumusan Tujuan Khusus melalui Penguatan Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Pemerintah harus bertindak sebagai fasilitator utama dengan menyusun turunan operasional dari Perda 10/2020, seperti Perbup atau Rencana Aksi Daerah (RAD), yang mencakup SOP implementasi, tujuan, sasaran, dan arah yang terfokus. Kunci operasionalnya adalah penetapan Profil Pembelajaran Tiga Pilar Budaya Cianjur sebagai parameter kinerja yang jelas bagi pendidik dan peserta didik. Misalnya, Profil Ngaos diarahkan pada karakter Qur’ani, Mamaos pada Harmoni/Nalar Kritis, dan Maenpo pada Gesit/Sehat Jiwa Raga. Profil ini menjadi jembatan antara nilai abstrak dan capaian performa yang terukur.

3.5. Penentuan Strategi Pengamalan dan Pemajuan Tiga Pilar Budaya Cianjur

Untuk memberikan daya ungkit ekonomi dan memotivasi pelestarian, strategi ini mengadopsi model pariwisata 3-S (Yoeti, 1996) :

- a. Something to See: Intensifikasi event dan gelar seni yang orisinal dan berkualitas tinggi untuk wisatawan.
- b. Something to Buy: Pengembangan UMKM berbasis kerajinan dan seni lokal.
- c. Something to Do: Penyediaan pelatihan budaya (Maenpo atau Mamaos) yang dapat diikuti oleh pengunjung.

Untuk menjamin kualitas dan konsistensi, penyusunan kurikulum muatan lokal harus menggunakan model administratif (top down approach) (Dakir, 2010). Tim ahli di tingkat Pemda merumuskan naskah akademik, kurikulum, dan bahan ajar yang terstruktur dan terverifikasi secara saintis, yang kemudian dioperasikan oleh guru di lapangan. Langkah ini esensial untuk menutup administrative failure yang terjadi di Dimensi Mekanisme Keputusan.

D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI/ CONCLUSION AND RECOMMENDATION

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi pengamalan Tiga Pilar Budaya Cianjur Ngaos, Mamaos, dan Maenpo di Kabupaten Cianjur, didapati kesimpulan bahwa pengamalan Tiga Pilar Budaya Cianjur saat ini menghadapi krisis implementasi kebijakan. Meskipun telah memiliki landasan hukum yang kuat (Perda No. 10/2020), implementasi di lapangan masih bersifat sporadis dan simbolik, gagal mencapai tingkat internalisasi nilai yang kuat pada masyarakat dan birokrasi. Diagnosis menggunakan dimensi kearifan lokal Mitchell menunjukkan kegagalan paling kritis terjadi pada Dimensi Mekanisme Pengambilan Keputusan Lokal dan Dimensi Sumber Daya Lokal, yang mencerminkan administrative failure yang mendasar. Ketiadaan pedoman operasional yang jelas, kurikulum terstruktur, dan SDM kompeten menghambat transisi nilai budaya dari konsep abstrak menjadi tindakan nyata yang terukur.

Faktor penghambat utama yang memengaruhi implementasi pengamalan Tiga Pilar Budaya Cianjur terbagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal didominasi oleh kelemahan kelembagaan, minimnya komitmen institusional di luar dinas terkait, dan kegagalan anggaran, ditandai dengan tidak adanya budget tagging spesifik untuk agenda pemajuan budaya, padahal potensi Dana Abadi Kebudayaan APBN sangat besar. Faktor eksternal, yang merupakan ancaman eksistensial, adalah disrupsi nilai akibat sekularisme, materialisme, dan hedonisme, yang secara langsung menentang fondasi spiritual Ngaos dan etika Sunda yang terkandung dalam Mamaos dan Maenpo.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi Administratif Publik yang holistik dan operasional. Wawasan utama menunjukkan perlunya reposisi budaya dari sekadar warisan seremonial menjadi modal sosial-ekonomi strategis. Strategi ini harus fokus pada (1) penguatan regulasi turunan (RAD/Perbup) untuk menutup administrative gap; (2) pengembangan Kurikulum Muatan Lokal model administratif yang wajib diimplementasikan di semua jenjang, dengan memanfaatkan pesantren sebagai leading sector untuk Ngaos dan Maenpo; dan (3) konversi nilai budaya ke aset pariwisata (model 3-S Yoeti) untuk memberikan motivasi ekonomi bagi pelestarian. Dengan demikian, Tiga Pilar Budaya Cianjur dapat melampaui simbolik, menjadi identitas daerah yang hidup, terukur, dan mampu berfungsi sebagai counter-culture yang efektif terhadap arus globalisasi.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi pengamalan Tiga Pilar Budaya Cianjur Ngaos, Mamaos, dan Maenpo di Kabupaten Cianjur, terdapat beberapa rekomendasi spesifik yang dapat Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur tempuh untuk memperkuat internalisasi Tiga Pilar Budaya Cianjur Ngaos, Mamaos, dan Maenpo di Kabupaten Cianjur sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dan DPRD dapat merumuskan kembali konsep pemajuan Tiga Pilar Budaya Cianjur berbasis anggaran dengan mekanisme check and balance, serta memperkuat good will pemerintah melalui kebijakan taktis dan prosedur operasional yang jelas.
2. Meningkatkan kualitas SDM kebudayaan yang berkomitmen, dukungan biaya, sarana-prasarana, serta penghargaan bagi pengembang budaya. Melaksanakan penelitian, pengkajian, dan sosialisasi Tiga Pilar; menyelenggarakan pendidikan terstruktur melalui kurikulum lokal di sekolah, madrasah, dan pesantren; serta mengembangkan budaya sebagai sumber ekonomi masyarakat.
3. Merumuskan strategi pembangunan daerah berbasis nilai Tiga Pilar dalam bidang agama, pendidikan, ekonomi inklusif, dan wisata budaya melalui analisis internal-eksternal, serta menginternalisasikannya dalam visi, misi, dan program kerja pemerintah.

4. Menyusun SOP dan indikator implementasi budaya lokal berbasis data, serta menjadikan pendidikan formal dan nonformal sebagai pilar utama pelestarian melalui muatan lokal yang terintegrasi dengan strategi karakter daerah.
5. Mengoptimalkan peran dunia usaha, media lokal, dan komunitas budaya melalui CSR, festival, dan inkubasi UMKM berbasis budaya lokal.
6. Menyusun Peraturan Bupati atau Rencana Aksi Daerah (RAD) Tiga Pilar Budaya Cianjur “Ngaos, Mamaos, Maenpo” sebagai turunan dari Perda No. 10 Tahun 2020 agar implementasi lebih terstruktur..

REFERENSI/ REFERENCE

- Al Rasyidin. 2012. Falsafah Pendidikan Islami: Membangun Kerangka Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Praktik Pendidikan. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Alisjahbana, S. T. 2008. Seni dan Sastra: di tengah-tengah pergolakan masyarakat dan kebudayaan (Cetakan Kedua). Jakarta, PT. Dian Rakyat.
- Aryanti, S., Sundawa, D., & Dahliyana, A. 2022. Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Tiga Pilar Budaya (Ngaos, Mamaos, Maenpo) Dalam Pembelajaran IPS di SMP. *Jurnal Pendidikan IPS Indonesia*, 6(2).
- Chatab, Nevizond. 2007. *Diagnostic Management*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Dakir. (2010). *Perencanaan Dan Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dayaksi & Yuniardi, S. (2008). *Psikologi Lintas Budaya*. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Dwiputrianti, S. 2025. *Strategi Inovasi Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia Pendekatan Terapan Untuk Masa Depan*. Bandung: Widina Media Utama.
- Fakih, M. 2003. *Analisis gender dan transformasi sosial*. Pustaka Pelajar.
- Fandi Tjiptono. 2000. *Strategi Pemasaran, Cet. Ke-II*. Yogyakarta: Andi.
- Francis Wahono. 2005. *Pangan, Kearifan Lokal dan Keanekaragaman Hayati*. Yogyakarta: Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas.
- Haviland, W. A. 1985. *Antropologi (Jilid 2)*. Jakarta Erlangga.
- Hofstede, G. 1981. *Culture's Consequences: International Differences In Work-Related Values*. Beverly Hills, CA.: Sage.
- Hofstede, G. J., & Minkov, M. 2010. *Cultures and Organizations: Software of The Mind (3rd ed.)*. McGraw Hill Professional.
- Ihgbal, M. 2017. *Internalisasi Nilai Nilai Budaya Dalam Seni Mamaos di Tengah Era Globalisasi*. Koentjaraningrat. 1993. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Koentjaraningrat. 1998. *Ilmu Antropologi*. Jakarta: Bhatara
- Kholis, N. 2003. *Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, Model, dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasmara Indonesia
- Kurnia, I. 2017. *Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Tiga Pilar Budaya Cianjur: Kajian di Desa Majalaya Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Maryam, S. 2012. *Menjawab Tantangan Global dengan Mengembangkan Potensi Lokal: Studi Kasus pada Budaya dan Literasi Masyarakat Cianjur*.
- Pace, R. W., & Faules, D. F. (2005). *Komunikasi Organisasi Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Rinitami Njatrijani. 2018. Kearifan Lokal dalam Perspektif Budaya Kota Semarang. Gema Keadilan Edisi Jurnal, 5(1).
- Rosidi, A. 2011. Kearifan Lokal dalam Perspektif Budaya Sunda. Bandung: Kiblat Buku Utama. Sagala, S. 2013. Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. Bandung: Alfabeta. Suryadi, E. 2018. Strategi Komunikasi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sutrisno, E. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Yunus, E. 2016. Manajemen Strategis. Yogyakarta: Andi Offset.
- Zamroni. 2013. Manajemen Pendidikan: Suatu Usaha Meningkatkan Mutu Sekolah